

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dua dekade terakhir, perekonomian Indonesia mengalami kerapuhan. Kerapuhan ini disebabkan karena Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis politik. Krisis ekonomi yang pertama dialami pada tahun 1997-1998 dan krisis ekonomi yang kedua dialami pada tahun 2008. Krisis ekonomi tahun 1997-1998 merupakan krisis ekonomi terberat yang menimpa Indonesia. Menurut Kaihatu (2006) beberapa faktor telah menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, namun yang paling utama adalah Indonesia masih buruk dalam memahami dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini dapat dilihat dari Gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua negara yang memiliki kualitas GCG terburuk di Asia pada tahun 2001. Hal yang sama terjadi kembali pada tahun 2008. Krisis ekonomi yang terjadi lebih mendunia karena menimpa negara Amerika yang merupakan negara pusat perekonomian dunia. Indonesia pun terkena dampaknya, karena Indonesia merupakan negara yang masih bergantung pada aliran dana dari investor asing. Dalam infobanknews.com (2010) mengatakan bahwa penyebab krisis di Amerika yang menjadi krisis global ini karena tidak diterapkannya

GCG secara konsisten. Dari krisis-krisis ekonomi yang terjadi dapat diketahui pentingnya GCG untuk kelancaran perekonomian dunia.

Monks dan Minow (2003) dalam Kaihatu (2006) mengatakan GCG merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan tersebut memiliki nilai tambah untuk semua pemangku kepentingan. Kaen dan Shaw (2003) dalam Kaihatu (2006) berpendapat bahwa GCG memiliki empat komponen utama yaitu kewajaran (*fairness*), keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountanbility*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Keempat komponen tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya.



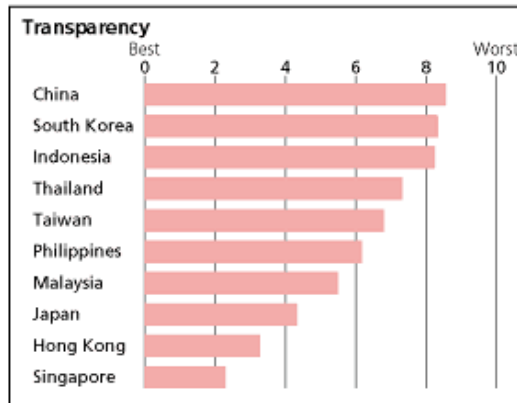
Gambar 1.1 Grafik Kualitas Good Corporate Governance Negara di Asia

Sumber: www.economist.com

Komponen yang terpenting dari keempat komponen utama tersebut adalah keterbukaan informasi/transparansi perusahaan. Transparansi perusahaan adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiil dan relevan mengenai perusahaan. Pemangku kepentingan perlu mengetahui semua informasi tentang perusahaan sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kedepannya. Walaupun transparansi adalah komponen terpenting, di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan kecurangan akan transparansi. Dua masalah yang sering terjadi mengenai transparansi yaitu kurangnya informasi yang diungkapkan perusahaan dan belum efektifnya sistem yang mendistribusikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ketiga transparansi yang buruk. Hal ini berarti masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum transparan terhadap pemangku kepentingannya.

Prinsip transparansi perusahaan sangat penting bagi banyak pihak. Dalam perpajakan, prinsip transparansi ini menimbulkan permasalahan. Permasalahan mulai timbul dengan pengolahan biaya-biaya yang rumit sehingga pihak eksternal tidak mengetahui dengan mudah apakah perusahaan benar-benar transparan atau tidak. Transparansi perusahaan telah diteliti oleh Balakrishnan, Blouin dan Guay (2012) dan Wang (2010). Variabel yang mempengaruhi salah satunya yaitu penghindaran pajak atau agresivitas pajak. Dari

penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa hasilnya tidak konsisten. Balakrishnan dkk (2012) membuktikan bahwa perusahaan yang semakin agresif melakukan penghindaran pajak akan semakin tidak transparan dalam memberikan informasi berkaitan dengan perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Wang (2010) membuktikan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak merupakan perusahaan yang transparan dalam memberikan informasi mengenai perusahaan.



Gambar 1.2 Grafik Transparansi Negara di Asia
Sumber: www.economist.com

Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Slemrod, 2004; dalam Balakrishnan dkk, 2012). Setiap perusahaan menginginkan memperoleh laba sebesar-besarnya dan berusaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban. Salah satu kewajiban yang materiil adalah pajak. Pajak dapat diminimalkan bahkan dihilangkan

dengan melakukan perencanaan pajak. Salah satu kegiatan perencanaan pajak adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah kegiatan mengurangi kewajiban pajak karena pada dasarnya kewajiban membayar pajak itu *non value added* bagi wajib pajak. Transaksi-transaksi yang tercakup dalam melakukan agresivitas pajak merupakan pengolahan biaya yang rumit sehingga pajak dapat diturunkan atau dihilangkan. Namun hal ini akan menyulitkan pemangku kepentingan untuk memahami pengolahan biaya yang kompleks tersebut. Manajemen perusahaan harus terlibat dalam kegiatan ini. Menurut Wang (2010), hal ini bertujuan agar penghindaran pajak ini dapat meningkatkan kekayaan dari pemegang saham.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh dari agresivitas pajak terhadap transparansi perusahaan. Alasan dari melakukan penelitian ini dikarenakan menurut Sarini dan Martani (2010) dalam Hidayanti (2013) banyak manajer dari perusahaan yang melakukan agresivitas pajak mengurangi volume pengungkapan yang berhubungan dengan pajak. Secara otomatis pengurangan volume pengungkapan tersebut akan berpengaruh terhadap transparansi perusahaan, sedangkan transparansi perusahaan penting dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Alasan lainnya yaitu terdapat perbedaan antara hasil penelitian Balakrishnan dkk (2012) dengan Wang (2010) yang pro dan kontra mengenai pengaruh agresivitas pajak terhadap transparansi perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah

perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampelnya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI karena jumlah dari perusahaan manufaktur banyak sehingga cukup untuk diteliti. Periode yang akan diteliti adalah periode 2011-2013. Penelitian ini menggunakan periode tersebut karena tahun 2011-2013 merupakan periode perekonomian Indonesia mencapai kestabilan pasca krisis ekonomi tahun 2008. Penelitian ini tidak menggunakan periode pasca krisis ekonomi 1999 karena jangka waktu yang sudah terlalu lama sehingga sulit dalam memperoleh data perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap transparansi perusahaan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh agresivitas pajak terhadap transparansi perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dengan hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi peneliti yang membaca dan melanjutkan penelitian berkaitan dengan bidang perpajakan sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui dan memahami pengaruh agresivitas pajak pada transparansi perusahaan bahkan dapat mengembangkan lebih lanjut penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengetahui apa pengaruh agresivitas pajak terhadap transparansi perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1. PENDAHULUAN

Menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan secara singkat mengenai penelitian terdahulu yang diambil sebagai referensi dan perbandingan, landasan teori yang memuat materi dan teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian masalah, pengembangan hipotesis, dan model analisis penelitian.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Menguraikan metode yang digunakan dalam menguraikan masalah yang meliputi desain penelitian, identifikasi variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang deskripsi data yang merupakan penjelasan data hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan penelitian.

BAB 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran yang berguna bagi peneliti selanjutnya.